



---

## Hambatan Kebijakan Politik Pemerintah dan Ekonomi Masyarakat Aceh Utara Tahun 2021-2022

Zulham  
Fisip-Universitas Malikussaleh  
Maksalmina  
Fisip-Universitas Malikussaleh

Alamat: Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh  
Telepon: (0645)-41373

*Korespondensi penulis: [zulham@unimal.ac.id](mailto:zulham@unimal.ac.id)*

### Abstrack

*The paper is to find out and explain the obstacles of political and economic policies in the form of The Village Owned Enterprise (what so called BUMDes) has developed three types of business units, namely a land pawning, a sound system rental and a cattle breeding business units. The research approach is used a qualitative method. This research was conducted using observation and interview techniques using a list of questions as a research instrument, then the data were analyzed descriptively. The theories used are decision and politics. The obstacles that occur in government and community policies include political obstacles, economy obstacle.*

*Key words: Political Policy, government and economy barriers*

### Abstrak

Makalah ini untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan kebijakan politik dan ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa selama Pandemi Covid-19. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mengembangkan tiga jenis unit usaha, yaitu gadai tanah, persewaan sound system dan unit usaha peternakan sapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai instrumen penelitian, kemudian data dianalisis secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah keputusan dan politik. Hambatan yang terjadi dalam kebijakan pemerintah dan masyarakat antara lain hambatan politik, kekerabatan dan protes masyarakat.

Key Word: Hambatan kebijakan, pemerintah dan ekonomi

### LATAR BELAKANG

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus

---

*Received Mei 30, 2023; Revised Juni 2, 2023; Juni 2, 2023*

*\*Corresponding author, e-mail address*

Corona mewabah ke seluruh dunia. Dikutip dari *CNN*, berikut beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan Corona virus, yang biasa disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah. (CNN, 2020). Virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Corona virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia 31resah. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Pandemi atau 31pandemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga pandemi31 atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. (Aida, 2020, Maret 19).

WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat 31pandemi virus Corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China. Jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, kini lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan. Italia, yang merupakan pandemi Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15 ribu kasus. Indonesia Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pengadaan vaksin. Vaksinasi memang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, ini ditandai dengan jajaran pemerintah, para tenaga medis, instansi negeri maupun swasta dan sebagian masyarakat tanah air yang sudah menerima vaksin. Pemerintah meyakini dengan vaksinasi akan membawa setiap 31pandemi31 termasuk Indonesia untuk kembali hidup dan beraktivitas normal. Harapan ini tentu didasarkan pada vaksin yang dipercayai paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular terutama Covid-19. Dengan berbagai upaya yang dilakukan

pemerintah, apakah penurunan angka kurva Covid-19 sudah menunjukkan kepastiannya? Ternyata penurunan angka yang terpapar covid belum bisa sepenuhnya diklaim. Jika melihat kebelakang pada bulan Juni sampai awal Agustus, angka kematian dan penularan Covid-19 sangat tinggi di tanah Air. (al, 2020)

Kurva Covid-19 yang tetap menunjukkan grafik kenaikan padahal berbagai upaya telah dilaksanakan, apakah ada motif politik, dan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan Kusno, masa 32pandemi ini meningkatkan tekanan politik, karena memaksa 32negara, perusahaan, dan warga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menangani perluasan periode ekonomi setelah karantina selesai. Bila tidak ada insentif untuk menjaga keuntungan bersama dari integrasi ekonomi global akan cepat berhenti berkembang. Begitu juga dengan ekonomi, Covid-19 telah membawa segelintir individu pada kesuksesan ekonomi karena wabah ini.

Bentuk politik lain yang bisa dikemukakan dalam masa 32pandemi ini adalah para pemangku jabatan dari yang tingkat atas sampai terbawah menunggangi untuk hasrat kekuasaan politiknya melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Contoh di tingkat global, sebagaimana yang ditulis oleh Scott L. Greer dkk, mengusulkan dalam penanganan Covid-19 ini, 32pandemi32 akan kesulitan menangani wabah ini bila hanya berpatokan pada 32pandemi kesehatan. Karena itulah 32pandemi perlu memahami kebijakan politiknya dalam penanganan pandemi ini. Kebijakan politik itu dengan mengatur secara ketat kegiatan sosial masyarakat, menerapkan jenis pemerintahan rezim (otokarsi) atau (demokrasi), menekan lembaga-lembaga politik yang hendak mengkritik serta 32sset32 mengontrol perawatan kesehatan sistem administrasi publik. (dalam S. H, 2019: 25). Dapat disimpulkan 32pandemi dalam politik dan ekonomi, sekarang ini jika dilihat dari kaca mata politik, status 32pandemi ini dimanfaatkan segelintir elit politik untuk memuluskan bagaimana mencapai kekuasaan dan apa yang telah dicadangkan. Polarisasi politik masih kuat memengaruhi para penguasa dalam penanganan Covid-19. Bila para pejabat pemerintah pusat sampai daerah masih terkontaminasi 32sentimen32 politik, tentu ini menguatirkan dalam penanganan 32pandemi Covid-19 yang pada akhirnya merugikan rakyat. Sedangkan Pandemi yang terjadi sekarang ini dilihat dari kaca mata ekonomi memberi keuntungan bagi sekelompok orang, pemilik korporasi atau segelintir 32negara yang memanen keuntungan ditengah derita dan kesulitan masyarakat global. Hal ini semakin dipertegas oleh WHO yang menuduh sejumlah 32negara32 maju telah

memonopoli pasokan vaksin Covid-19 dan 33negara33 maju telah menghalangi jalan 33negara berkembang dalam berdirikari pengembangan vaksin dan pembuatannya. (Gustomy, 2020).

Badan Usaha Milik Desa disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 33asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa gampong baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara adalah “BUMDes Bagi Beurata” yang didirikan pada tanggal 01 November 2017 yang ditetapkan dengan qanun gampong nomor 2 tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Bunyi *Qanun Gampong* (Undang-undang Desa) nomor 2 tahun 2017 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dilakukan dengan beberapa unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bagi Beurata antara lain; Unit usaha gadai tanah sawah,Unit Usaha Penyewaan Sound System, dan Unit usaha Ternak Lembu, yang dimana pada ketiga unit usaha tersebut mendapatkan pembagian nilai sebesar:

- a. 60% ( enam puluh perseratus ) dimiliki Oleh BUMDes
- b. 40% ( empat puluh perseratus ) dimiliki oleh Desa

Berdasarkan observasi awal, didapatkan beberapa permasalahan di desa gampong baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara antara lain, banyak potensi gampong yang belum bisa dikembangkan, masih rendahnya partisipasi masyarakat, dan kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin.

## **KAJIAN TEORITIS**

Adapun teori yang digunakan adalah kebijakan. Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan

cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. (Marzali, 2012: 20).

Tohir Bahnan (2022), mengenai Implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi kasus Taman UMKM Bungkarne), dengan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung sudah baik, namun masih perlu membenah dalam berbagai aspek, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, tidak adanya lembaga keuangan mikro di kota Bandar Lampung, kurangnya sumber daya manusia yang ada di dinas perindustrian perdagangan koperasi. Selanjutnya Nurdiah Mufidatul Alimah (2021), memperkuat Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, dengan argumen sektor UMKM di Indonesia mengalami dampak buruk dari pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat dan terhambatnya kebutuhan prima keluarga. Dampak tersebut berturut seperti penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Beranjak dari kajian teoritis di atas, penulis menarik untuk melanjutkan kajian-kajian di atas untuk dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2014: 248). Pengamatan. Observasi adalah cara yang sangat berguna, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan

untuk mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan penginderaan. (Bungin, 2011: 11).

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, merupakan pembantu utama metode observasi (pengamatan), tentunya peneliti walaupun dibantu oleh banyak asisten yang dapat menggantikan pengamatannya secara bergantian karena kurangnya data yang diperoleh dari pengamatan harus dilakukan. diisi dengan data yang diperoleh dari wawancara. (Widi, 2010: 236-237). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden melalui percakapan langsung dan tatap muka. Wawancara atau wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. (Bungin, 2003: 62). Dokumentasi adalah suatu cara pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda dan foto kegiatan dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. (Arikunto, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hambatan Politik dan Ekonomi***

Setiap Proses Pembuatan kebijakan nyaris akan menimbulkan pro dan kontra, diperparah apabila tidak merujuk kepada fakta di lapangan, dalam artian melihat apakah BUMDes sudah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, hal ini penting karena sebelum rumusan kebijakan ini ditetapkan harus melihat kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat sehingga cita-cita didirikan BUMDes untuk memakmurkan masyarakat bisa tercipta dengan baik.

BUMDes sudah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, masyarakat juga perlu menilai karena merekalah yang harus menerima dampak yang baik, mereka juga yang harus diperhatikan, masyarakat merupakan orang yang terkena dampak yang telah dilakukan oleh aparatur gampong, maka dari itu temuan penelitian berdasarkan elemen masyarakat. kondisi BUMDes sudah tercipta lapangan kerja, tetapi masih belum merata dikarenakan masih ada hubungan politik didalam BUMDes tersebut. Masyarakat

mempertanyakan apa yang dilakukan oleh aparatur gampong, dan apa solusi agar kedepannya tidak terjadi lagi. Masyarakat menilai apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka diselesaikan aparatur dengan melakukan cara musyawarah baik antara aparatur dan masyarakat.

Aparatur desa harus menerima kritikan atau saran dari masyarakat agar BUMDes kedepannya lebih baik, dengan adanya kritikan dan saran masyarakat maka BUMDes kedepannya biar lebih berkembang. aparatur gampong harus melakukan beberapa hal yang nantinya dapat lebih memajukan BUMDes kedepannya, masyarakat berpendapat aparatur gampong harus melakukan introspeksi, bekerja keras dalam memajukan BUMDes, tidak mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan orang banyak, melakukan pendekatan dengan masyarakat, meningkatkan keahlian tatacara yang benar, mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, dan harus mampu memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Hambatan Merupakan segala sesuatu yang menghalangi dan menghambat seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan sesuatu pasti akan ada hal-hal yang menjadi penghambat yang bersifat melemah atau menghalangi.. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam yang dipengaruhi oleh kondisi politik sehingga sangat berdampak pada kinerja BUMDes, seperti memasukkan saudara-saudara nya kedalam unit usaha yang dibutuhkan. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang luas (masyarakat dalam berbagai status serta kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun. Kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di atur dengan baik oleh para atasan.

Hal ini berarti bahwa kebijakan merupakan salah satu variabel “penting” yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Dapat kita saksikan hingga hari ini beragam program-program pemerintah yang dapat dikatakan “kurang” berhasil dalam proses pelaksanaannya seperti

hubungan dinasti politik pada BUMDes,Infrastruktur,dan lain-lainnya yang sangat memerlukan solusi yang sangat serius agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Tidak didasarkan pada landasan pemikiran, pelaksanaan tergantung pada aktor yang lain, tidak terbangun kesepakatan yang baik, dan kurang komunikasi dan koordinasi. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masyarakat, kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan kebijakan harus berdasarkan musyawarah sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi. Beberapa hambatan yang Terjadi dalam Kebijakan Pemerintah dan Masyarakat di Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

Hambatan Politik: Hambatan politik bisa saja terjadi ketika ada berbagai “kepentingan” para aktor di dalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran. Kekeluargaan: Hambatan yang kedua adalah kekeluargaan. Kekeluargaan adalah hal yang terjadi dalam kalangan kita, mereka yang mempunyai jabatan seenaknya memasukkan keluarganya kedalam unit usaha yang diinginkan, padahal masih ada masyarakat yang miskin akibat Covid-19. Adanya protes dari masyarakat: Masalah ini yang kerap kali terjadi, masyarakat ada yang melakukan protes kepada aparaturnya karena elit-elit BUMDes yang tidak merata. Oleh sebab itu aparaturnya harus melakukan musyawarah untuk memperbaiki hal tersebut agar kedepannya tidak akan terulang lagi. Perbedaan agenda tujuan aparaturnya :Seringkali ketika kebijakan itu disusun, berbagai aparaturnya memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersebut, sehingga yang terjadi adalah bukan kebijakan yang tertuju kepada kepentingan masyarakat, tetapi hanya kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam penyusunan tersebut.

Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat: Semua persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Ada kalanya persoalan-persoalan ini merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat. Kepentingan-kepentingan masyarakat umum dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan dan kepentingan pribadi yang terorganisasikan sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan atau kebijaksanaan



pemerintahan. Adanya kemampuan kebijakan pemerintahan: Suatu kebijakan pemerintahan supaya dapat diterapkan secara lebih baik sangat ditentukan oleh adanya kemampuan kebijakan pemerintah seperti ; menciptakan unit-unit usaha baru, strategi kebijakan pemerintah, dan harus menciptakan proses pembuatan kebijakan yang baik dan adil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Pada kondisi tertentu politik sangat berperan dalam kebijakan. Namun keseimbangan politik dalam kebijakan harus bijak implementasinya. Hambatan yang terjadi dalam kebijakan pemerintah antara masyarakat Gampong Baro, masih ada hubungan politik di dalam BUMDes dan pemberataannya belum maksimal untuk memperkerjakan masyarakat gampong, seperti pilih pilih kasih yang ada berhubungan dengan kekeluargaan. Diharapkan kepada aparat di Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera agar tidak ada hubungan politik (kekeluargaan), jika tidak dapat mengimbangi kenetralan atau ketidak berpihakan, dan dapat melakukan kinerja lebih baik lagi kedepannya serta mendengarkan aspirasi masyarakat yaitu salah satunya melakukan pengembangan BUMDes agar lebih baik dan merata dalam perspektif ekonomi dan kepentingan politik kebijakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Aida, N. R. (2020, Maret 19). *Update Virus Corona di dunia*. Kompas.com.
- al, I. W. (2020). "Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695>. Diakses tanggal 21 Maret tahun 2022.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*, PT.Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- CNN. (2020). Indonesia.
- Gustomy, R. (2020). Pandemi Ke Infodemi: Polarisasi Politik Dalam Wacana COVID-19 Pengguna Twitter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781>. Diakses tanggal 21 Maret tahun 2022.

Marzali, Amri. (2012) *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

S. H. dkk. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Media Pustaka.

Tohir Bahnan (2022), *Impementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kota Bandar Lampung (Studi kasus Taman UMKM Bungkarno)*.

<http://repository.radenintan.ac.id/22622/1/BAB%201%205%20DAPUS.pdf>.

Diakses tanggal 20 Januari tahun 2023.

Undang-undang Desa (Qanun) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiah Nurdiah. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*.

<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5354>. Diakses tanggal

20 Januari tahun 2023.